

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN: MELACAK PERAN SOCIAL MOVEMENT
INSTITUTE DALAM PEMBANGUNAN**



**Disusun oleh
Jayyidan Falakhi Mawaza
1820001017**

**Pembimbing
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jayyidan Falakhi Mawaza**
NM : 18200010174
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Yogyakarta, 30 November 2020
Saya yang menyatakan



Jayyidan Falakhi Mawaza
NIM : 18200010174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jayyidan Falakhi Mawaza**
NM : 18200010174
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2020
Saya yang menyatakan



Jayyidan Falakhi Mawaza
NIM : 18200010174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN: MELACAK
PERAN SOCIAL MOVEMENT INSTITUTE DALAM PEMBANGUNAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAYYIDAN FALAKHI MAWAZA
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010174
Telah diujikan pada : Senin, 21 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.
SIGNED

Valid ID: 5fec078fa6721



Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fe362d2bb2f8



Penguji III

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 600416aa9f250

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 21 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6005357bafcc6

Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pembangunan: Melacak Peran Social Movement Institute dalam Pembangunan

Yang ditulis oleh :

Nama : Jayyidan Falakhi Mawaza, S.Sos
NIM : 18200010174
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A)

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, 10 Desember 2020
Pembimbing



Dr. Pajar Hatma Indra Jaya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan Ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tesis yang amat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan atas Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis ini aku persembahkan kepada:

Almamaterku tercinta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga konsentrasi Islam,
Pembangunan dan Kebijakan Publik.

Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu tulus mendoakan
Adikku yang kusayangi dan Kawan-kawan progresif yang selalu aku banggakan

MOTTO

AKU BODOH MAKA AKU MEMBACA

(Jayyidan Falakhi Mawaza, Yogyakarta 30 November 2020)



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan dan haturkan kepada Allah SWT yang tiada hentinya mencurahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga nanti di hari akhir. Dengan harapan semoga kita senantiasa mampu menjaga dan melaksanakan perintah agama sebagaimana Rasulullah memberikan pengajaran pada umat-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka tesis ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi penulis untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M. A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan arahan, kritik dan saran bagi tesis penulis.
5. Para Dosen Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas

segenap tumpukan Ilmu berupa teori-teori kajian Islamic studies, Pembangunan maupun kebijakan publik.

6. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IMKAP) atas kehangatan ngopi dan bercengkerama bersama.
7. Teman-teman Pelopor Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) Dani, Budi, Rohit, Kholil, Ikhsan, Mahbub dan Zainuddin atas ilmunya dalam membangun relasi dengan masyarakat luas.
8. Teman-teman Abdurasyid Institute Bob dan Resa atas suka dan duka selama di Jogja.
9. Ayahanda Abdul Manan Anwar dan Ibunda Siti Zaetun atas ketulusan doa, kasih dan sayangnya.
10. Keluarga besar pondok pesantren modern Al-Anwar Ploso Pacitan atas keikhlasan untuk berkhidmah demi untuk meninggikan kalimat Allah.

Yogyakarta, 30 November 2020
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Jayyidan Falakhi Mawaza
NIM.18200010174

ABSTRAK

Jayyidan Falakhi Mawaza 18200010174. Tesis: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN: MELACAK PERAN SOCIAL MOVEMENT INSTITUTE DALAM PEMBANGUNAN. Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kehadiran LSM di Indonesia sejak tahun 1980-an sering mendapat stigma negatif. Mulai dari stigma LSM sebagai wadah untuk mencari uang dan menghamba kepada donor hingga stigma LSM sebagai pendukung pemerintah karena banyaknya LSM plat merah yang menjalankan proyek-proyek dari pemerintah. Dalam konteks pembangunan seharusnya LSM menjadi entitas yang kritis terhadap pemerintah dengan cara mengkritik pendekatan pembangunan developmentalis dan ekonomisentris yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini mengkaji tentang peran LSM Social Movement institute dalam pembangunan. Secara spesifik pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan aktivis muslim progresif.

Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi pembangunan yang dimiliki oleh LSM Social Movement Institute dilakukan dengan cara membentuk intelektual organik yang mempunyai nilai-nilai dan kapasitas pembangunan yang selaras dengan konsep pembangunan Amartya Sen yakni konsep keberagaman, kebebasan dan keberfungsian. Nilai-nilai itulah yang menjadi modal mereka untuk berkiprah lebih lanjut dalam pembangunan di masyarakat. Para alumni alumni dari SMI yang disebut dengan aktivis muslim progresif ini berhasil menginternalisasikan tiga agenda yang dimiliki oleh muslim progresif yakni agenda kesetaraan gender, pluralisme dan keadilan social.

Kata Kunci : *Lembaga Swadaya Masyarakat, Pembangunan, Aktivis Muslim Progresif.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II : DISKURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGENALAN MUSLIM PROGRESIF	39
A. Diskursus Pembangunan	39
1. Definisi Pembangunan	39
2. Pendekatan Pembangunan	44
B. Pengenalan Muslim Progresif	51
1. Pengertian Muslim Progresif	51
2. Agenda Muslim Progresif	53
3. Genealogi Muslim Progresif di Indonesia	58

BAB III : PROFIL SOCIAL MOVEMENT INSTITUTE	66
A. Sejarah Berdiri Social Movement Institute	66
B. Visi dan Misi	68
C. Struktur Kepengurusan Social Movement Institute.....	69
D. Program Social Movement Institute	71
BAB IV : PERAN DAN HASIL PEMBANGUNAN AKTIVIS MUSLIM	
PROGRESIF SOCIAL MOVEMENT INSTITUTE.....	85
A. Peran Social Movement Institute dalam Pembangunan Aktivis Muslim	
Progresif.....	85
1. Menginternalisasikan Konsep Keberagaman	86
2. Menginternalisasikan Konsep Kebebasan.....	100
3. Menginternalisasikan Konsep Functioning	105
B. Hasil Social Movement Institute dalam Pembangunan Aktivis Muslim	
Progresif.....	109
1. Munculnya Kesadaran Kesetaraan Gender	110
2. Munculnya Kesadaran Pluralisme	114
3. Munculnya Kesadaran dan Praktek Keadilan Sosial	117
BAB V : PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128
CURRICULUM VITAE (CV).....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sekolah Aktivis Pemula	70
Gambar 2	Diskusi Mingguan SMI	71
Gambar 3	Bedah Buku Bulanan SMI	73
Gambar 4	Nobar Film SMI	74
Gambar 5	Buku Terbitan SMI	75
Gambar 6	Laman Depan Web Suluh Pergerakan	76
Gambar 7	Jurnal Suluh Pergerakan	78
Gambar 8	Advokasi di Urut Sewu Kebumen	79
Gambar 9	Pelatihan Pupuk Organik	81
Gambar 10	Penjualan Kaos Gerakan	82
Gambar 11	Penjualan Buku	82

Gambar 12	Pembentukan Petani di Desa Gandurejo	90
Gambar 13	Aksi Kamisan Yogyakarta	92
Gambar 14	Kartu Pers Suluh Pergerakan	94
Gambar 15	Pamflet Sekolah Menulis Progresif	95
Gambar 16	Pementasan Teater Suluh	97
Gambar 17	Malam Sastra Suluh	99
Gambar 18	Aktivis SMI Bersama Aliansi Solidaritas Pangan Jogja	104
Gambar 19	Diskusi Kesenjangan Perempuan SMI	110
Gambar 20	Tulisan Tentang Kesenjangan Gender Alumni Aktivis SMI	111
Gambar 21	Bedah Buku Kerjasama Dengan PMKRI	114
Gambar 22	Dialog Lintas Agama Antara Aktivis SMI dengan Stube Hemat	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat global sejak tahun 1960-an memunculkan anggapan bahwa LSM mempunyai peran penting sebagai agen sosial yang bertugas dalam pembangunan. Edwards mencatat ada peningkatan pertumbuhan LSM di tingkat global dari periode ke periode. Di tahun 1993 tercatat kurang lebih 28.000 LSM transnasional yang aktif. Meskipun kehadiran LSM transnasional memiliki ukuran dan peran yang berbeda-beda tetap saja gerakan LSM memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.¹

Kehadiran LSM merata tidak hanya di negara maju melainkan juga di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Kemunculan LSM di Indonesia pada umumnya pertama-tama hadir di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta dan Banjarmasin. Sebagai contoh pioneer LSM di Indonesia seperti PKBI dan Bina Swadaya lahir di ketiga kota tersebut. Peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan LSM di Indonesia terjadi pada periode tahun 1980-an meskipun peningkatan jumlah LSM tersebut masih terkonsentrasi di kota-kota besar. LSM di Indonesia bergerak di berbagai macam lini bidang mulai dari bidang partisipasi politik, pemberdayaan

¹ Michael Edwards, *NGOs Right and responsibilities, A new deal for global governance*, (London: the foreign policy center, 2000), 9.

masyarakat, kebijakan pembangunan sampai dengan bidang pemberantasan korupsi.²

Meskipun di tingkat global LSM dianggap berwajah positif, namun di Indonesia banyak stigma negatif yang melekat pada LSM. Di Indonesia LSM dianggap sebagai aktor yang kontra terhadap pembangunan. Kegiatan LSM seakan-akan hanya “merecoki” tugas pemerintah. Perkembangan LSM pada periode tahun 1980-an merupakan respon terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah yang sangat sentralistik dan top down. Kebijakan pemerintah tersebut memunculkan serangkaian efek negatif seperti tidak meratanya partisipasi dan tidak meratanya hasil pembangunan yang dikritik LSM.³

LSM juga mendapatkan stigmasi sebagai tempat mencari uang dengan menghamba pada asing. Anggota LSM dianggap sebagai alat dari luar negeri untuk melemahkan pemerintah. Hal ini dikarenakan kehadiran LSM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan lembaga donor internasional dan LSM internasional yang mulai membuat dan mengembangkan kegiatan-kegiatannya pada periode tahun 1980-an. Lembaga donor seperti Save The Children Fund dari Amerika dan Oxfam dari Inggris aktif membuat kegiatan di Indonesia dan turut pula membiayai LSM-LSM di Indonesia.⁴ Banyak sekali kelahiran LSM yang dipicu oleh donor (*donor driven*). LSM yang dipicu oleh donor dibentuk secara sengaja hanya bertujuan untuk mengejar

² Muhammad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, (Jakarta: E-Law Indonesia, 2002), 73-74.

³ Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, 75.

⁴ Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, 72.

bantuan asing saja. Inisiatif lokal dan kesukarelaan bergumul dengan masyarakat miskin semakin terabaikan. LSM semakin kaku dan rigid akibat profesionalisme yang dituntut oleh lembaga donor.⁵

LSM terkadang juga mendapat stigma sebagai lembaga yang melanggengkan pemerintah yang berkuasa. LSM model ini sering disebut LSM plat merah. Hal ini terjadi ketika LSM sangat intens bekerja dengan pemerintah. LSM yang memiliki paradigma developmentalisme memiliki konsekuensi bahwa LSM tersebut lebih condong menjadi bagian dari negara dibanding menjadi bagian dari masyarakat sipil. Praktis perbedaan antara negara dan LSM yang memiliki paradigma developmentalisme hanyalah pada metode dan pendekatan pembangunan. Bila negara menggunakan pendekatan top-down maka LSM menggunakan pendekatan dari bawah bottom up.⁶

Dalam banyak kasus LSM “plat merah” ini justru dikooptasi oleh negara dengan melaksanakan dan menjalankan proyek-proyek dari pemerintah. Pemerintah menggelontorkan dana khusus untuk didistribusikan kepada segelintir LSM. Hal tersebut membuat segelintir LSM sangat mengandalkan kucuran dana dari pemerintah dan terkesan mengalami ketergantungan. Akibat ketergantungan tersebut secara otomatis LSM tersebut harus menjalankan program sesuai dengan kehendak pemerintah. Akibatnya LSM tidak kritis lagi

⁵ Michael Edwards dan David Hulme, *Non-Governmental Organizations, Performance and Accountability: Beyond the Magic Bullet*, (London: Earth Scan Publication Ltd, 1995), 4.

⁶ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 166.

terhadap berbagai macam persoalan-persoalan struktural dan selalu menyetujui apapun yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Dalam konteks pendefinisian pembangunan seharusnya LSM merupakan salah satu entitas yang menjadi garda depan yang mengkritik pendefinisian dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tugas dari LSM adalah menciptakan ataupun memproduksi intelektual organik. Intelektual organik tersebut merupakan para aktivis LSM yang mampu memproduksi pengetahuan dan mentransmisikannya ke khalayak masyarakat luas. Isi pengetahuan yang ditransmisikan tersebut harapannya dapat membantu masyarakat dalam menganalisa relasi-kuasa yang selama ini merugikan sebagian kalangan.⁸

Produksi intelektual organik sangat penting dan urgen dilakukan oleh LSM agar para aktivis yang bergumul dan berada di LSM tidak menjadi figur atau sosok intelektual “menara gading”. Bekal pengetahuan dan pengalamanya yang diperoleh di Lembaga Swadaya Masyarakat justru tidak digunakan untuk membela dan didedikasikan untuk masyarakat yang tertindas melainkan pengetahuan yang dimilikinya justru digunakan untuk berkongsi dan mendukung penguasa yang dzolim. Untuk membedakan intelektual yang menghianti masyarakat tertindas yang menyalahgunakan pengetahuanya dengan intelektual yang menggunakan pengetahuanya untuk mengadvokasi

⁷ Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, 101-104.

⁸ Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, 146-147.

masyarakat tertindas maka Antonio Gramsci memunculkan terma intelektual organik untuk membedakanya dengan intelektual tradisional yang opportunistis.⁹

Salah satu LSM yang berupaya untuk melakukan pembangunan intelektual organik adalah Social Movement Institute (SMI).¹⁰ Pembangunan manusia yang dilakukan oleh Social Movement Institute adalah dalam rangka untuk memproduksi aktivis-aktivis yang mempunyai kapasitas dalam mendampingi masyarakat tertindas (*mustadafin*). Dalam segi pendiriannya organisasi masyarakat sipil ini lahir untuk turut andil dalam mendampingi individu maupun kelompok yang mengalami peminggiran dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Lembaga Swadaya Masyarakat ini terdiri dari para aktivis yang kebanyakan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Intelektual organik yang dipilih adalah muslim. Muslim adalah yang terbesar di Indonesia, namun kondisinya cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Masih banyak intelektual muslim yang memiliki nalar dan sikap yang skripturalis dan opportunistis. Cara berpikir yang skripturalis sangat merugikan masyarakat karena cara berpikir tersebut sangatlah tidak kontekstual dan secara otomatis tidak bisa merespon permasalahan-permasalahan yang terkini. Begitupun dengan sikap opportunistis yang juga merugikan masyarakat karena justru intelektual organik tersebut mencari keuntungan diatas

⁹ Quintin Hoare dan Geoffrey Norwell Smith, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, New York: International Publishers, 1983), 5-16.

¹⁰ Social Movement Institute didirikan oleh tiga orang tokoh yakni Eko Prasetyo, Said Tuhuley dan Agung wijaya di kota Yogyakarta.

penderitaan masyarakat. Guna mengoptimalkan potensi muslim yang menjadi terbesar di Indonesia untuk menyelesaikan dan meminimalisir banyaknya problem sosial yang terjadi seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan relasi antara perempuan dan laki-laki, terpinggirkannya kaum nelayan, petani serta buruh maka menjadi penting produksi intelektual organik dimasifkan. Di SMI intelektual organik muslim ini disebut dengan aktivis muslim progresif. SMI berusaha untuk menciptakan dan memproduksi aktivis muslim progresif. Muslim progresif adalah orang-orang yang mempunyai kerangka teologi, metodologi dan aksi untuk mendorong adanya transformasi sosial.¹¹

Produksi aktivis muslim progresif yang dilakukan oleh SMI menggunakan paradigma Islam progresif.¹² Islam progresif menawarkan pendekatan kritik ganda (*multiple critique*) dalam melihat berbagai macam permasalahan. Kritik ganda merupakan kritik berpisau dua, disatu sisi mengkritik umat muslim sendiri disisi yang lain mengkritik Barat. Kritik ganda ini bersumber kepada nilai dasar bahwa setiap muslim maupun non muslim, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan dan seterusnya memiliki nilai yang sama. Sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa jadi diakibatkan oleh seseorang ataupun kelompok yang mengatasnamakan Islam. Disisi yang lain hegemoni yang dilakukan Barat juga turut serta dalam

¹¹ Wawancara dengan Melki selaku direktur Social Movement Institute pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22.30 WIB.

¹² Islam progresif merupakan pemikiran Islam kontemporer yang muncul guna merespon permasalahan kontemporer yang menghinggapai masyarakat muslim seperti keadilan. Kesetaraan gender dan pluralisme. Pemikiran Islam progresif di introdusir oleh intelektual muslim yang berasal dari amerika bernama omid safi.

melanggengkan permasalahan sosial yang terdapat pada masyarakat. Oleh karena itu kedua sisi tersebut harus dibongkar sekaligus diperbaiki. Bahkan bagi muslim progresif pun bila ia cenderung menjadi kaku, dogmatis dan otoriter harus di kritik dengan keras.¹³

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Social Movement Institute karena berupaya untuk melakukan pembangunan aktivis muslim dengan paradigma Islam progresif. Dalam penelitian ini kami membatasi hanya ingin mengetahui bagaimana peran yang dimainkan Social Movement Institute dalam membangun aktivis muslim karena mengingat aktivitas SMI kebanyakan terfokus kepada pembangunan yang memiliki paradigma dan praktek Islam progresif. Selain itu penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui bagaimana hasil pembangunan aktivis muslim yang dilakukan oleh Social Movement Institute. Sebagai penegasan penelitian ini hanya ingin melihat pembangunan aktivis muslim progresif yang dilakukan oleh SMI pada periode kepengurusan tahun 2017-2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran LSM Social Movement Institute dalam menciptakan aktivis muslim progresif ?
2. Bagaimana hasil LSM Social Movement Institute dalam menciptakan aktivis muslim progresif ?

¹³ Omid Safi, *Progressive Muslim: On Justice Gender and Pluralism*, (England, One World Publication, 2005), 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran LSM Social Movement Institute dalam menciptakan aktivis muslim progresif.
2. Mengetahui hasil LSM Social Movement Institute dalam menciptakan aktivis muslim progresif.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran terhadap karya Ilmiah baik berupa tesis, buku, maupun artikel jurnal, penulis sadar bahwa sudah banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis anggap sedikit menggambarkan tentang penelitian yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pertama, Penelitian Ageng Nata Praja¹⁴ *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*, menjelaskan terkait dengan terdistorsinya nilai-nilai kemandirian dan independensi Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa LSM di Kabupaten Grobogan terdistorsi karena keberadaanya hanya

¹⁴ Ageng Nata Praja, *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*, Semarang: Pascasarjana Ilmu Politik UNDIP, 2017.

untuk mencari untung dan rendahnya profesionalisme aktvisnya dalam membantu masyarakat.

Kedua, artikel jurnal Ari Gandjar Herdiansyah dan Randi¹⁵, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, menjelaskan terkait dengan peran ORMAS dan LSM sebagai penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat dihadapan negara. Selain itu ORMAS dan LSM juga memberikan kontribusi yang positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Ketiga, Penelitian Hardina Primanda Nugraheni¹⁶, *Strategi Advokasi LSM Terhadap Eksistensi Hutan Jawa*, menjelaskan terkait dengan beragam strategi LSM ARuPA dalam mengadvokasi permasalahan seputar hutan jawa. Strategi LSM tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiologis dari masyarakat. Di daerah yang memiliki sejarah perlawanan yang cukup panjang LSM ARuPA menekankan pada pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat. Sedangkan di daerah yang kulturnya halus justru melakukan hal yang lebih frontal.

¹⁵ Ari Gandjar Herdiansyah dan Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Jurnal Sosioglobal, 2016.

¹⁶ Hardina Primanda Nugraheni, *Strategi Advokasi LSM Terhadap Eksistensi Hutan Jawa*, Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010.

Keempat, penelitian Suharko¹⁷ *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*, menjelaskan secara rinci bagaimana dinamika interaksi LSM dengan pemerintah di Indonesia selama periode 1966-2001. Sepanjang waktu tersebut interaksi LSM dan pemerintah mengalami pasang surut dengan berbagai macam hambatan dan tantangan. Selain itu penelitian ini menjelaskan juga bahwa perkembangan LSM sangat ditentukan oleh pergantian rezim pemerintahan. Pergantian rezim pemerintahan membuat LSM memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dengan berbagai isu yang diangkat mulai dari isu gender feminisme, HAM, lingkungan dan lain-lain.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan keempat penelitian sebelumnya yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari keempat penelitian tersebut tidak ada yang mengkaji bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pembangunan aktivis serta membahas bagaimana hasil pembangunan aktivis yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Penelitian terkait dengan Pembangunan Manusia

Pertama, artikel Jurnal Amril Maryolo¹⁸ *Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial*, menerangkan terkait dengan pereduksian pemaknaan atas pembangunan yang hanya dimaknai sebagai

¹⁷ Suharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintahan dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).

¹⁸ Amril Maryolo, *Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Jurnal Sosiologi Reflektif, 2018.

pembangunan dalam bidang ekonomi. Dalam tulisan ini mencoba untuk mengenalkan konsep lain dari pembangunan yang bertumpu pada manusia dengan menggunakan konsep pembangunan sebagai kebebasan dari Amartya Sen.

Kedua, Penelitian Ahmad Muhlasul¹⁹ *Indeks Pembangunan Manusia dalam Perda Syariah (Studi Kebijakan Publik Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Amartya Sen dalam Perda Syariah di Kota Bandung, Tasikmalaya dan Bulukumba)*, membicarakan terkait dengan kemunculan perda-perda syariah di Indonesia terkhusus di tiga kota yakni Bandung, Tasikmalaya dan Bulukumba. Dalam penelitiannya ingin melihat sejauh mana hubungan perda-perda syariah dengan konsep pembangunan manusia global serta sejauh mana *outcome* atau dampaknya dengan kebutuhan publik.

Ketiga, artikel jurnal P. Y Nur Indro²⁰ *Kemiskinan Global Dalam Perspektif Development as Freedom Amartya Sen: Kasus Indonesia*, menjelaskan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui program *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mengutamakan pembangunan manusia dalam perspektif Amartya Sen yang mendorong kebebasan pada setiap individu.

¹⁹ Ahmad Muhlasul, *Indeks Pembangunan Manusia dalam Perda Syariah (Studi Kebijakan Publik Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Amartya Sen dalam Perda Syariah di Kota Bandung, Tasikmalaya dan Bulukumba)*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Yogyakarta, 2017.

²⁰ P. Y Nur Indro, "Kemiskinan Global Perspektif Development as Freedom Amartya Sen Kasus: Indonesia", Bandung: *Jurnal HI UKP*, 2013.

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembangunan manusia tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal pengkajian penelitian sebelumnya yang sama sekali tidak mengkaji peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan manusia.

3. Penelitian terkait dengan Social Movement Institute

Sejauh yang penulis ketahui hanya ada satu penelitian sebelumnya yang terkait dengan Social Movement Institute yakni penelitian dari Muhammad Syahrur²¹ *Advokasi Teroris: Studi Strategi Advokasi Teroris yang mengalami Stigma Merugikan*, menjelaskan terkait dengan strategi Social Movement Institute dalam mengadvokasi teroris yang mengalami ketidakadilan dengan menggunakan metode litigasi dan non-litigasi.

Perbedaan penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana peran Social Movement Institute dalam melakukan pembangunan aktivis muslim progresif sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan strategi Social Movement Institute dalam mengadvokasi teroris.

4. Penelitian tentang Intelektual Organik

Pertama, penelitian Daniel Dhakidae²² *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi antara

²¹ Muhammad Syahrur, *Advokasi Teroris: Studi Strategi Advokasi Social Movement Institute Terhadap Teroris yang mengalami stigma merugikan*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

²² Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

intelektual Indonesia dengan pemerintahan orde baru tidak bisa dilepaskan dari modal, kekuasaan dan kebudayaan. Intelektual yang disoroti dalam penelitian ini adalah intelektual dalam dunia akademis yang diibaratkan sebagai “tukang” yang harusnya selalu memproduksi pengetahuan bukan saja ilmu untuk ilmu melainkan ilmu untuk rakyat agar intelektual sejalan dengan intelektual organik.

Kedua, penelitian Yudi Latief²³ *Intelegensia Muslim dan Kuasa (Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20)*, penelitian ini menjelaskan kesinambungan dan perubahan-perubahan yang berlangsung dalam gerak perkembangan intelegensia muslim di Indonesia. Secara umum penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa perpolitikan Indonesia dari awal abad-20 hingga akhir abad-20 salah satunya ditentukan oleh peran penting intelegensia muslim. Intelegensia muslim merupakan individu-individu intelektual yang mempunyai peran sebagai perumus dan artikulator dari ideologi-ideologi dan identitas-identitas kolektif yang mana dalam penelitian ini juga disebut sebagai intelektual organik. Intelektual organik dalam kolektivitas muslim muncul dari para anggota komunitas intelegensia bernama ulama-intelek.

Kedua penelitian terdahulu yang terkait dengan intelektual organik tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian dari Daniel Dakhidae dan Yudi Latief mengkaji kiprah intelektual organik di Indonesia secara periodik di masa orde baru dan sebelumnya di masa abad ke-20. Sedangkan penelitian ini tidak mengkaji kiprah intelektual organik di Indonesia secara periodik. Melainkan

²³ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa (Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20)*, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012).

mengkaji bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memproduksi intelektual organik.

E. Kerangka Teoritis

1. Tentang LSM di Indonesia

Definisi LSM memiliki landasan yuridis yakni dalam intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990. Dalam lampiran II intruksi tersebut disebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang memiliki anggota berasal dari warganegara Republik Indonesia yang secara sukerela dan tulus mempunyai niat untuk bergabung melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang kegiatan yang telah ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut *Non Government Organisation* (NGO) telah lama mewarnai kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat di Indonesia. Dari segi kuantitas keberadaan dari LSM di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Peningkatan jumlah kuantitas LSM di Indonesia tak lepas dari terjadinya reformasi yang menggulingkan rezim otoritarian orde baru. Jika pada era sebelum reformasi jumlah LSM diperkirakan hanya berjumlah 4000 hingga 7000-an. Setelah reformasi jumlah LSM di Indonesia mengalami

²⁴ Ari Gandjar Herdiansyah, "Peran Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, Vol 1, No 1, 2016, 49-67.

peningkatan yang signifikan. Menurut Departemen Dalam Negeri sebagaimana yang dikutip oleh A.S Hikam jumlah LSM di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 13.500 LSM. Keberadaan LSM tersebut merata tidak hanya di level nasional melainkan di level lokal seperti di provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia.²⁵

LSM mempunyai peran yang sangat besar sebagai kekuatan alternatif dalam membangun dan memperkuat gerakan demokrasi melalui beragam kegiatan seperti penyadaran, pendampingan maupun pembelaan kepada masyarakat yang kecil dan miskin. Adapun isu yang diangkat dan menjadi konsen dari LSM juga beragam mulai dari partisipasi politik, kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pembangunan hingga isu korupsi.²⁶ Kemunculan LSM sebagai kekuatan alternatif juga dapat dimaknai sebagai respon atas lemahnya kontrol dari lembaga negara dan partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Perkembangan kemunculan LSM terutama LSM yang bergerak dalam bidang sosial politik bertujuan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah, menuntut kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan mengadvokasi berbagai macam masalah yang merugikan masyarakat. Pada masa orde baru sebagian LSM menjadi kelompok alternatif yang kritis yang selalu memberi

²⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 6.

²⁶ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 19.

tekanan kepada pemerintah. Pola hubungan yang terjalin antara LSM dan negara lebih banyak bersifat konfliktual.²⁷

Menurut Mansour Faqih terdapat dua tujuan dibentuknya LSM yakni: pertama, untuk menyeimbangkan kekuatan seluruh aktor masyarakat sipil dengan kekuatan pemerintah dengan cara terus-menerus membangun kapasitas dari masyarakat korban ketidakadilan. Sehingga nantinya dapat memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang kuat dimata pemerintah dan dapat mendorong agenda untuk melawan dan mengubah segala bentuk ketidakadilan termasuk ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah. Kedua, LSM berupaya untuk terus membangun dan mengokohkan kesadaran kritis masyarakat agar menjadi kelompok penekan dan kelompok penjaga sumber daya strategis negara agar tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh segelintir elit.²⁸

Hubungan antara LSM dan negara tidak berjalan linier yakni selalu berhadap-hadapan melainkan juga bisa menjalin kerjasama. Menurut Philip Eldridge sebagaimana yang dikutip oleh Mansour Fakih ada tiga corak hubungan antara negara dan LSM. Pertama, kerjasama tinggi. LSM dengan corak ini melakukan kerjasama tinggi dengan negara namun memiliki kegiatan minimal dalam bidang politik. Perhatian mereka hanya untuk menjalankan program dari pemerintah yang bersifat pemberdayaan

²⁷ Meuthia Ganie Rachman dalam Maruto MD dan Anwari WMK, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2002), 182.

²⁸ Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, 3.

masyarakat.²⁹ Kedua, politik tingkat tinggi. LSM dalam kategori ini memiliki kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik dengan sebagai pembela masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan negara. LSM dalam kategori ini menjalin kontak dengan negara yang sangat minimal dan tetap kritis. Sedangkan yang ketiga adalah penguatan akar rumput. LSM dalam kategori ini hanya memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bawah akan hak-haknya. LSM yang hanya berfokus kepada penguatan akar rumput sama sekali tidak tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah karena meyakini bahwasanya suatu perubahan akan terjadi bila kapasitas dari masyarakat ditingkatkan dan peningkatan masyarakat tersebut bukan hasil dari pemerintah.³⁰

Setiap LSM berdiri dan hadir tentunya pasti memiliki paradigma sebagai landasan aktivitas dan gerakannya. Paradigma yang dipilih juga menentukan sejauh mana tingkat signifikansi dari kontribusi LSM kepada masyarakat. Secara umum LSM di Indonesia memiliki tiga tipe paradigma yang digunakan titik pijak dalam melakukan pembangunan. Adapun tipe tersebut adalah: pertama, LSM yang berparadigma konformis (developmentalis). LSM dengan paradigma konformis ini mengidentifikasi bahwa berbagai macam permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kebodohan merupakan produk dari

²⁹ Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, 212.

³⁰ Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, 213.

kemasalahan dan kelemahan dari setiap individu yang mengalaminya. Berangkat dari paradigma tersebut, LSM tipe ini hanya mempunyai satu jalan keluar yakni berupaya untuk melakukan perubahan mental serta budaya yang terdapat dalam masyarakat sasaran.³¹

Kedua, tipe LSM berparadigma reformis. LSM dengan paradigma reformis melihat permasalahan sosial dan ekonomi yang menjangkiti masyarakat luas disebabkan oleh lemahnya fungsi-fungsi dari demokrasi salah satunya adalah sulitnya akses partisipasi dalam politik dan pembangunan. Cara yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan upaya memfasilitasi ruang partisipasi untuk masyarakat dalam politik dan pembangunan. Sedangkan yang ketiga adalah LSM dengan paradigma transformatif. LSM dengan paradigma ini cenderung radikal dalam melihat suatu masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi diidentifikasi disebabkan oleh struktur ekonomi politik yang timpang yang sengaja diciptakan oleh elit negara dan swasta. LSM dengan paradigma transformatif berfokus kepada penguatan hak asasi manusia dan meminimalisir kesenjangan sosial serta berupaya untuk menggalang gerakan politik masyarakat seperti demonstrasi dan mimbar bebas. Tak hanya upaya dengan cara reaktif seperti demonstrasi, upaya untuk menggalang gerakan politik masyarakat tersebut juga dengan cara kreatif

³¹ Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, 125.

yakni dengan beragam cara untuk mewujudkan kemandirian rakyat terutama dalam segi ekonomi.³²

2. Diskursus Pembangunan

Pada mulanya diskursus terkait pembangunan hanyalah dimaknai sebagai pembangunan ekonomi. Hal tersebut mempengaruhi pembangunan di berbagai negara-negara di dunia yang mengarusutamakan ukuran keberhasilan suatu negara melalui keberhasilan ekonomi melalui representasi GDP (*Gross Domestic Product*) atau (*Gross National Product*). Ukuran penentuan melalui GDP dan GNP akhirnya menggenalisir bahwa pembangunan dikatakan berhasil jika pembangunan ekonomi mengalami keberhasilan. Namun semua itu berubah pasca terjadinya krisis ekonomi dunia di tahun tahun 1990-an. Ukuran pembangunan ekonomi melalui GDP dan GNP membawa tragedi berupa kesenjangan antara si kaya dan si miskin.³³

Dalam diskursus pembangunan yang lalu, manusia tak lebihnya hanya dimaksudkan sebagai bagian dari *capital* (modal). Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia layaknya sebuah benda yang dikelola oleh pemilik modal untuk dimanfaatkan pekerjaanya guna mendapatkan keuntungan

³² Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, 131.

³³ E. Wayne Nafziger, *Economic Development*, (New York, Cambridge University Press, 2006), 335.

sebanyak-banyaknya.³⁴ Dalam pembangunan, manusia hanyalah dijadikan obyek pasif dari pada obyek aktif.

Pemikiran Amartya Sen merombak secara mendasar terkait dengan peran manusia dalam konteks pembangunan. Sen membangun suatu ideal baru terkait dengan pembangunan yang mengarusutamakan manusia. Pengarusutamaan manusia dalam pembangunan disebutnya dengan pembangunan sebagai kebebasan.³⁵ Namun terminologi kebebasan yang dipikirkan oleh Sen berbeda dengan terminologi kebebasan yang dimiliki oleh liberalisme. Jika terminologi kebebasan di dalam liberalisme diartikan sebagai pasar bebas yaitu para pemilik modal mengendalikan aktivitas perdagangan secara bebas. Ukuran keberhasilan pembangunan di dalam liberalisme melalui ukuran seberapa banyak akumulasi modal yang diciptakan dan seberapa banyak sumber daya baik alam maupun manusia yang diperoleh oleh para pemilik modal.³⁶

Sen memaknai kebebasan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus berfungsi secara baik. Kebebasan adalah bagaimana memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada manusia. Pemberian ruang gerak secara luas tersebut adalah memberikan akses yang sama kepada setiap orang tanpa memandang latar ekonomi, agama, ras, suku dan lain sebagainya. Ketika

³⁴ PY. Nur Indro, "Kemiskinan Global Dalam Perspektif Development as Freedom Amartya Sen: kasus Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan*, Vol 9, No 1, 2013, 14.

³⁵ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford: Oxford University Press, 1984), 94-130.

³⁶ Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, (New York, Basic Books, 1976), 92.

akses yang sama tersebut diberikan kepada setiap orang, maka dapat dipastikan setiap orang dapat berkompetisi dengan baik dan *fair*. Kebebasan positif yang dimaknai oleh Sen menjadikan setiap individu mempunyai kapasitas yang sama dalam memanfaatkan sumber daya untuk keberlangsungan hidup.³⁷

Perlu diketahui bahwa ketidakbebasan manusia seperti tidak adanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi atas kelas dan identitas serta beragam bentuk perampasan hak milik (*entitlement*) pribadi adalah bentuk-bentuk pemiskinan yang dapat menciptakan penderitaan bagi setiap masyarakat yang dipersulit dan dicabut kebebasannya.³⁸ Sebagai contoh perampasan atas tanah yang dimiliki oleh para petani dengan dalih pembangunan demi kepentingan umum yang terkadang diinstrumentasi atas kerjasama antara negara dan swasta tanpa disertai dengan ganti rugi yang layak merupakan bentuk ketidakbebasan yang justru diciptakan oleh negara. Masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah tidak diberikan kesempatan untuk memilih dan mendialogkan pilihannya kepada pemerintah. Akibat diabaikannya hak masyarakat untuk mendialogkan pilihannya tersebut secara otomatis masyarakat telah menjadi korban dari ketidakbebasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Agar kebebasan manusia tetap terjamin dan tidak dilanggar maka diperlukan proses negosiasi dan renegotiasi aturan sosial yang terus-

³⁷ Amartya Sen, *Resources, Values and Development*, (Cambridge, Harvard University Press, 1984), 108.

³⁸ Dawam Rahardjo, Ekonom dari Santineketan pengantar dalam Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Orang Miskin*, (Jakarta:Penerbit Mizan, 2001), 14-15.

menerus. Dengan negosiasi dan renegotiasi aturan sosial tersebut diharapkan kemerdekaan instrumental dari setiap manusia dapat dijaga atau bahkan ditambah. Untuk proses negosiasi dan renegotiasi aturan sosial tersebut organisasi masyarakat sipil mempunyai peran yang signifikan untuk menekan pemerintah atau pihak swasta untuk menciptakan tatanan sosial yang adil agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.³⁹

Secara garis besar teori tentang pembangunan manusia Amartya Sen dinamakan dengan teori kapabilitas (*capability Theory*). Teori kapabilitas ini secara sederhana dimaknai sebagai kebebasan dan pengembangan lingkungan yang cocok bagi manusia untuk berkembang. Kapabilitas mengacu kepada apa yang sebenarnya orang mampu dan dapat lakukan bukan pada sumber daya apa yang dimiliki dan mampu diakses oleh seseorang. Hal tersebut berfokus kepada pengembangan kemampuan orang untuk memilih kehidupan yang dirasa mempunyai arti dan nilai penting.⁴⁰ Di dalam teori ini terdapat beberapa instrument penting di dalam proses pembangunan manusia yakni:

a. Konsep Keberagaman (*Diversity*)

Di dalam konsep keberagaman ini, suatu keberagaman bukanlah menjadi hambatan dan rintangan namun justru merupakan sebuah modal

³⁹ Sri Henny Indarti, *Pembangunan Manusia dalam Pandangan Amartya Sen*, 37-41.

⁴⁰ Melanie Walkers, "Amartya sen's Capability Approach and Education", *Journal Educational Action Research*, Vol 13, No 1, 2005, 13.

dan potensi positif untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Keberagaman dilihat sebagai hal yang alamiah dan wajar bagi kehidupan manusia. Dalam konsep keberagaman terdapat empat keberagaman yakni, (1) keberagaman fisik, (2) keberagaman kondisi social, (3) keberagaman psikis, (4) keberagaman masalah.⁴¹

Sistem demokrasi harus menjadi acuan dalam cara pandang melakukan pembangunan. Di dalam sistem demokrasi setiap perbedaan harus dihargai dan diafirmasi. Hal tersebut berbeda dengan cara pandang pembangunan yang mengedepankan utilitarianisme yang seringkali memiliki konsekuensi hanya mengafirmasi atau melayani kepentingan-kepentingan mayoritas.⁴²

b. Konsep Kebebasan (*Freedom*)

Di dalam proses pembangunan manusia bagaimanapun harus mendorong untuk menciptakan ruang-ruang kebebasan. Ruang-ruang kebebasan itu diciptakan agar manusia lebih leluasa dalam mengungkapkan dan berusaha untuk mencapai kebutuhannya. Selain itu, manusia juga dapat menentukan cara-cara yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep kebebasan ini mempunyai dua visi yakni, *the primary end* sebagai peran legal formal kebebasan merupakan acuan pada kebebasan yang sesungguhnya dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia. Sedangkan peran instrumental

⁴¹ Sen, *Development as Freedom*, 134.

⁴² Sunaryo Hasan, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), 110-111.

mengacu kepada alat-alat atau sarana-sarana untuk mencapai kebebasan yang hakiki. Dalam kebebasan sebagai peran instrumental terdapat lima jenis ragam kebebasan yakni, (1) kebebasan politik, (2) kesempatan dalam bidang ekonomi, (3) kesempatan dalam bidang sosial, (4) jaminan akan adanya keterbukaan, (5) jaminan keamanan.⁴³

c. Konsep keberfungsian

Konsep keberfungsian merupakan konsep yang mengusahakan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh manusia. Kondisi kesejahteraan manusia diukur dari sejauh mana manusia tersebut dapat memfungsikan dirinya. Namun kondisi kesejahteraan seorang manusia tersebut tidak cukup hanya untuk mensejahterakan dirinya pribadi akan tetapi keberfungsian manusia dapat dilihat dari seberapa besar perannya di dalam aktivitas usaha dan perannya dalam mensejahterakan orang yang lainnya.⁴⁴

Di dalam konteks penelitian ini proses pembangunan manusia yang menggunakan konsep keberagaman, kebebasan dan keberfungsian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ditujukan untuk membangun kapabilitas dari para aktivis muslim. Kapabilitas tersebut

⁴³ Sen. *Development as Freedom*, 135.

⁴⁴ Sen, *Development as Freedom*, 136.

diberikan agar para aktivis muslim menggunakan Islam sebagai alat kekuatan pembebas dari berbagai macam praktek penindasan yang seringkali dilakukan oleh golongan kaya dengan atas nama pembangunan, pasar bebas dan ekonomi neoliberal. Pembangunan kapabilitas ini diberikan kepada para aktivis muslim guna menghindari pereduksian Islam yang hanya dijadikan komoditas (komodifikasi agama) yang memang sengaja diciptakan oleh kapitalisme. Pereduksian Islam yang hanya sekedar dimaknai sebagai komodifikasi meninabobokkan para muslim dalam praktek keislamannya yang seringkali tidak berpihak kepada kaum lemah (*mustadafin*).⁴⁵

3. Muslim Progresif

Pada hakekatnya Agama Islam merupakan Agama yang sangat progresif meskipun tidak diembel-embeli dengan kata progresif dibelakangnya. Meskipun begitu penggunaan terma Islam progresif bertujuan sebagai penguatan dan pengingat bagi setiap muslim untuk selalu meyakini dan mempraktekkan Islam secara progresif. Yang dapat menentukan progresif atau tidaknya adalah setiap pemahaman dan laku dari individu muslim itu sendiri bukan terletak pada Agama Islam yang sudah progresif sejak kelahirannya.

Islam progresif sendiri merupakan terma yang muncul dalam kajian Islam kontemporer. Para akademisi maupun aktivis belakangan ini

⁴⁵ Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal*, (Yogyakarta: Resist Book, 2014), 332-333.

memberikan terma-terma kepada aksi dan pemahaman umat muslim yang berusaha untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai humanis seperti keadilan dan pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadafin). Pandangan Islam progresif merupakan kepanjangan dan kelanjutan dari Islam liberal. Meskipun begitu kemunculan terma Islam progresif memiliki perbedaan dengan Islam liberal. Islam liberal sendiri sangat terlalu berfokus kepada kritik internal atas pemahaman dan praktek keberislaman sebagian umat muslim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai humanis. Sedangkan kritik eksternal kepada modernitas, kapitalisme, kolonialisme yang juga mengibiri nilai-nilai humanis justru cenderung diabaikan.⁴⁶

Hal itulah yang melatarbelakangi munculnya aksi dan pemahaman Islam progresif yang memberikan fokus yang berimbang antara kritik internal dan eksternal. Kritik internal yang hanya ditujukan kepada aksi dan pemahaman sebagian umat muslim yang dinilai menyalahi nilai-nilai humanis menempatkan Islam progresif dalam posisi modernis, namun disaat bersamaan ia juga tetap kritis terhadap modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan atau dapat dikatakan post-modernis.⁴⁷

Islam progresif menawarkan pendekatan kritik ganda (*multiple critique*) dalam melihat berbagai macam permasalahan. Kritik ganda merupakan kritik berpisau dua. Disatu sisi mengkritik umat muslim sendiri

⁴⁶ Omid Safi, *Progressive Muslim: On Justice Gender and Pluralism*, (England, One World Publication, 2005), 1.

⁴⁷ Farish A. Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan dan Masa Depan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: SAMHA, 2006), 23.

disisi yang lain mengkritik Barat. Kritik ganda ini bersumber kepada nilai dasar bahwa setiap muslim maupun non muslim, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan dan seterusnya memiliki nilai yang sama. Sebuah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa jadi diakibatkan oleh seseorang ataupun kelompok yang mengatasnamakan Islam. Disisi yang lain hegemoni yang dilakukan Barat juga turut serta dalam melanggengkan permasalahan sosial yang terdapat pada masyarakat. Oleh karena itu kedua sisi tersebut harus dibongkar sekaligus diperbaiki. Bahkan bagi muslim progresif pun bila ia cenderung menjadi kaku, dogmatis dan otoriter harus di kritik dengan keras.⁴⁸

Dalam konteks Indonesia kemunculan ide dan praksis Islam progresif juga untuk merespon gerakan Islam liberal yang dinilai hanya berkonsentrasi untuk menghadirkan ide dan praksis keislaman yang damai dengan menafsirkan nilai-nilai Islam yang sangat inklusif, pluralis serta toleran dan cenderung mengabaikan persoalan-persoalan riil dimasyarakat. Islam progresif tidak hanya berfokus kepada ide-ide pluralisme dan toleransi melainkan juga berfokus kepada pembelaan terhadap kaum lemah seperti pembelaan terhadap buruh yang dizolimi oleh para pemilik modal. Selain itu Islam progresif juga berfokus untuk merespon wacana-wacana seperti penolakan kapitalisme ekstraktif yang menyebabkan krisis social-ekologis.⁴⁹

⁴⁸ Safi, *Progressive Muslim: On Justice Gender and Pluralism*, 4.

⁴⁹ Zuhairi Misrawi, "Dari Islam Liberal menuju Islam Progresif" kata pengantar untuk buku Salahuddin Jursy, *Membumikan Islam Progresif*, (Jakarta: Paramadina, 2004), vii-xiv.

Islam progresif selalu berorientasi kedepan tentang permasalahan-permasalahan praktis yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sesuatu yang maju dan berubah hanya merupakan ekspresi normatif dan aspek ritual sosial Islam, seperti cara muslim menjalankan aktivitas sosial, cara mereka berhadapan dengan persoalan zaman dan lain sebagainya. Islam progresif dapat membaca arus perkembangan zaman dan tidak terikat oleh lingkungan ide dan epistemologi yang begitu sempit.⁵⁰

Seorang muslim progresif selalu kritis terhadap struktur-struktur dan relasi kuasa yang timpang dan tidak adil. Mereka berupaya menegakkan keadilan dan kebenaran melalui kritik wacana kuasa (*discourse power*) yang mencoba menyambungkan antara wacana (*discourse*) yang dominan dengan struktur kekuasaan (*power structure*). Biasanya pembongkaran wacana kuasa tersebut dilakukan oleh muslim progresif melalui tulisan-tulisan yang sangat keras dan tajam yang sangat menusuk inti dari budaya kuasa-politik para elit. Hal tersebut membuat segala ungkapan untuk menutup-nutupi sebuah fakta dapat dibongkar dan yang tersisa hanyalah kebobrokan dari penguasa.⁵¹

Muslim progresif memiliki tiga agenda besar yang harus senantiasa dilaksanakan dan diperjuangkan yakni: berupaya untuk mendorong umat muslim untuk membuka pandangan terkait pluralitas, senantiasa untuk peka terhadap kesetaraan gender dan yang terakhir adalah selalu

⁵⁰ Farish A. Noor, *Islam Progresif: Peluang, Tantangan dan Masa Depan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: SAMHA, 2006), 24.

⁵¹ *ibid*, 21-22.

memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.⁵² Adapun uraian terkait dengan tiga agenda muslim progresif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan agenda yang tidak bisa dilepaskan dari agenda muslim progresif. Jika menilik dari segi historis kesetaraan gender sebenarnya sudah diajarkan oleh nabi pada lima belas abad yang lalu. Konsep kesetaraan gender tersebut terutama mengenai hak-hak dan kewajiban seorang perempuan. Nabi sendiri sangat sering sekali mengutus Aisyah untuk mengajarkan materi-materi tertentu terkait dengan ajaran Islam. Para sahabat laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berdiskusi, bertanya dan menerima langsung ajaran yang disampaikan oleh nabi. Bila dalam perjalanannya terjadi diskriminasi gender hal tersebut terjadi karena adanya penafsiran Al-Quran dan Hadist yang bias gender dan misoginis. Penafsiran terhadap teks nash yang bias gender dan misoginis selalu menempatkan posisi perempuan dibelakang laki-laki yang dapat dikatakan memarginalkan posisi perempuan.⁵³

Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa kesetaraan gender hanya sebagai perangkat feminis saja. Padahal kesetaraan gender yang sebenarnya adalah bukan terletak pada atribut feminis saja seperti lipstick dan bedak melainkan kesetaraan gender seharusnya lebih

⁵² Safi, *Progressive Muslim: On Justice Gender and Pluralism*, 2.

⁵³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), 179.

difokuskan kepada eksistensi perempuan di ruang publik. Strategi yang paling ampuh dan efektif dalam upaya menangkis praduga dan stereotipe yang dilontarkan oleh laki-laki adalah dengan membangun gerakan-gerakan kesetaraan gender yang dipelopori oleh perempuan sendiri.⁵⁴

Manusia diciptakan dan dilahirkan ke dunia tanpa bisa memilih apakah menjadi laki-laki atau perempuan. Melainkan Allah-lah yang menentukan dengan sesuai kehendaknya. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan hendaknya bukan dijadikan alat untuk mendeskreditkan dan mensubordinasikan perempuan. Melainkan harus dijadikan sumber rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Keadilan gender bukanlah dihadiahkan kepada kaum laki-laki secara khusus atau perempuan secara khusus melainkan sesuatu yang menjadi hadiah bagi gender laki-laki dan perempuan. Sebagai entitas manusia laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama dan utuh oleh Allah.⁵⁵

b. Pluralisme

Manusia sebagai komunitas yang lahir dan hidup di dunia tidak terlahir sama melainkan memiliki berbagai macam perbedaan dalam bentuk ras, bahasa, bentuk fisik dan sederet perbedaan-perbedaan yang lainnya. Perbedaan sebagai realitas sosial terkadang menimbulkan perasaan jumawa dengan menganggap dirinya ataupun kelompoknya yang paling superior dibanding dengan seseorang ataupun kelompok

⁵⁴ Wilson. H.T, *Sex and Gender, Making Cultural Sense Civilization*, (Leiden: Brill, 1989), 67.

⁵⁵ Omid Safi, *Islamic Modernism* dalam *Encyclopedia of Religion*, (Farmington Hills: McMillan, 2005), 10-11.

yang lainya. Kesadaran tentang pluralitas menjadi penting untuk menghindari perasaan superior yang menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial.

Pluralitas manusia semakin menjadi kongkret setelah adanya globalisasi. Dalam konsep agama, pluralitas merupakan prinsip yang selalu dinasehatkan kepada para pengikutnya. Di dalam agama Islam setiap pemeluknya diajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati kepada pemeluk agama yang lain. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda jalinan benang persaudaraan selalu dijaga dengan baik sehingga konsep pluralisme dapat dikatakan sudah hadir di dalam agama Islam. Konsep pluralisme sendiri tidak hanya hasil dari persemaian penghormatan antar pemeluk agama melainkan juga merupakan persemaian penghormatan antar peradaban.⁵⁶

Tak cukup hanya membangun kesepahaman diantara perbedaan yang dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok. Pluralisme seharusnya dapat dipraktekkan dalam wujud membangun keterlibatan orang lain (*the other*) dalam aktivitas keseharian dan menjamin kedudukan yang sama dalam aktivitas keseharian tersebut tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Praktek pluralisme harus dibangun diatas fondasi pemahaman bahwa dibalik banyaknya

⁵⁶ Nurcholis Madjid, *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001), 175

perbedaan yang begitu banyak terdapat kesamaan yang hakiki yakni kesamaan dalam kemanusiaan.⁵⁷

c. Keadilan Sosial

Usaha-usaha untuk mewujudkan keadilan sosial telah menjadi tema utama dalam diskusi dan pemikiran oleh bangsa Sumeria yang menduduki lembah Mesopotemia kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Masalah-masalah sosial seperti upaya mewujudkan keadilan menyibukkan dan menghabiskan waktu dari para pemikir pada masa itu. Kebanyakan pemikir pada saat itu kebanyakan merupakan pemimpin agama yang mempunyai kedudukan yang tinggi karena satu-satunya kasta yang dapat dikatakan melek huruf.⁵⁸ Dari segi historis cita-cita keadilan umat manusia pertama kali berusaha diwujudkan dalam Kode Hammurobi (*Code of Hammurabi*) yang menjadi payung hukum bangsa Sumeria.⁵⁹

Muslim progresif mempunyai anggapan bahwa sebuah keadilan merupakan pondasi dari sebuah kedamaian. Konflik atau kerusuhan antar orang maupun antar kelompok biasanya disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Sebuah kondisi kedamaian tidak hanya diartikan sebagai kondisi tidak adanya perang atau pertikaian karena kondisi aman bisa jadi dijadikan kedok oleh para elit tertentu untuk memapankan struktur sosial yang tidak adil dan timpang. Oleh karena itu memperjuangkan tegaknya

⁵⁷ Safi, *Islamic Modernism* dalam *Encyclopedia of Religion*, 13.

⁵⁸ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 203.

⁵⁹ *ibid*, 503.

keadilan lebih utama dibandingkan dengan mempertahankan situasi aman atau tidak adanya perkelahian.⁶⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berupaya untuk memahami peristiwa dan fenomena empiris secara menyeluruh. Pemahaman peristiwa dan fenomena empiris tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata pada suatu konteks khusus dan tertentu dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah.⁶¹

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶² Untuk menentukan atau memilih subyek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain: yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu cukup untuk dimintai informasi.⁶³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi

⁶⁰ Omid Safi, *The Politics of Knowledge in Premodern Islam*, (Chappel Hill: UNC Press, 2006), 10.

⁶¹ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 89.

⁶² *ibid*, 135.

⁶³ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 188.

adalah meliputi: pendiri yang diwakili oleh Eko Prasetyo, ketua badan pekerja yakni Melki dan pengurus Social Movement Institute yang terlibat di dalam pembangunan aktivis muslim yang terdiri dari 4 orang koordinator divisi. Yaitu: Ari Wijayanto koordinator divisi pendidikan dan pelatihan, Janeska Mahardika koordinator divisi penerbitan dan publikasi, Lutfian Haekal koordinator divisi penelitian dan pengembangan serta Fakhrurozi koordinator divisi advokasi. Sedangkan obyek penelitian dari penelitian ini adalah para aktivis SMI yang masih aktif dan alumni yang dibangun oleh Social Movement Institute.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data berupa perilaku yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan pandangan individu terlibat.⁶⁴ Peneliti mengamati upaya pembangunan aktivis muslim progresif di Social Movement Institute dengan

⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 123.

mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis muslim progresif di berbagai bidang kegiatan seperti kegiatan sekolah alternatif, diskusi mingguan, bedah buku, nonton bareng film, mengelola web, menerbitkan buku dan jurnal, advokasi serta kesenian. Setelah mengamati kegiatan tersebut peneliti kemudian menganalisis, mencatat dan menarik kesimpulan dari apa yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Di dalam pelaksanaannya wawancara ini lebih bebas mengajukan pertanyaan namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetap terkontrol dalam hal pertanyaan dan jawaban, ada pedoman wawancara yang dijadikan dalam alur, urutan dan penggunaan kata.⁶⁵

Dalam wawancara penelitian ini, peneliti mencari data kepada pihak Ketua badan pekerja social movement institute yang menjadi *key person* dan *key informan* di dalam pembangunan aktivis muslim. Selain itu peneliti melakukan

⁶⁵ *ibid*, 123.

wawancara kepada beberapa pengurus yang turut serta dalam pembangunan aktivis muslim serta beberapa aktivis muslim yang dibangun oleh Social Movement Institute.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notula rapat, leger, agenda, foto, dan lain sebagainya.⁶⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini mengambil dari foto, profil dan pamflet kegiatan Social Movement Institute. Di dalam kegiatan observasi peneliti menggunakan kamera handphone dalam mengabadikan proses kegiatan dalam pembangunan Social Movement Institute.

4. Teknik Validitas Data

Untuk mengetahui keabsahan atau kevaliditasan data yang didapat selama penelitian, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sendiri dapat digunakan untuk menguji

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 28.

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.⁶⁸

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah untuk memahami penelitian ini, penulis menyusun pembahasan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan penelitian tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang isinya terdiri atas judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Tujuan dari pendahuluan ini adalah memberikan stimulasi tentang isi bahasan dari penelitian ini.

Bab *kedua*, merupakan kerangka teoritik yang terkait dengan diskursus pembangunan yang terdiri dua kerangka teoritik yakni diskursus pembangunan yang terdiri atas definisi pembangunan dan pendekatan pembangunan. Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan pengenalan pembangunan muslim progresif yang terdiri atas pengertian muslim progresif, Agenda muslim progresif dan genealogi muslim progresif di Indonesia.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan terkait dengan gambaran umum LSM Social Movement Institute yang terdiri atas sejarah berdiri,

⁶⁸ *Ibid*, 372.

visi dan misi, struktur kepengurusan lembaga, program lembaga dan sumber dana lembaga.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni seputar bagaimana peran Social Movement Institute dalam pembangunan aktivis muslim progresif. Selain itu apa saja hasil yang social movement institute dalam melaksanakan pembangunan aktivis muslim progresif.

Bab *kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran dari pembahasan yang telah dijelaskan terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pembangunan: melacak peran Social Movement Institute dalam pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama ini pembangunan dimaknai sangat ekonomisentris yang berakibat kepada sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang hanya menjadi alat untuk eksplorasi dan eksploitasi. Agar pembangunan tidak tereduksi menjadi ekonomi sentris maka Lembaga Swadaya Masyarakat turut serta dalam berupaya melaksanakan pembangunan manusia salah satunya melalui pembangunan berbasis kapabilitas. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pembangunan manusia berbasis kapabilitas adalah Social Movement Institute. Pembangunan manusia yang dilakukan oleh Social Movement Institute adalah dalam rangka untuk memproduksi aktivis-aktivis muslim yang mempunyai kapabilitas dalam mendampingi dan membela masyarakat tertindas. Social Movement Institute memiliki paradigma Islam progresif. Islam progresif sendiri berupaya untuk memproduksi muslim yang kritis terhadap realitas ketidakadilan yang terjadi tidak hanya di dunia muslim melainkan di dunia non-muslim.

Adapun peran Social Movement Institute dalam pembangunan aktivis muslim progresif adalah dengan melaksanakan tiga konsep yang ada dalam teori kapabilitas yakni konsep keberagaman, kebebasan dan keberfungsian. Bentuk pelaksanaan konsep keberagaman adalah dengan

memfasilitasi berbagai macam aktivitas yang berbeda yang diinginkan oleh para aktivis Social Movement Institute seperti aktivitas advokasi, aktivitas kepenulisan dan aktivitas kesenian. Sedangkan bentuk pelaksanaan konsep kebebasan adalah dengan memberikan kebebasan kepada para aktivis Social Movement Institute untuk memilih aktivitas yang ingin diikuti, memberikan kebebasan dalam mengemukakan ide dan memberikan kebebasan dalam menjalin kerjasama. Adapun bentuk pelaksanaan konsep keberfungsian adalah dengan dimilikinya keberfungsian para aktivis dalam melaksanakan advokasi masyarakat, dimilikinya keberfungsian dalam mengetahui diskursus pengetahuan hingga keberfungsian dalam manajemen penerbitan buku.

Hasil pembangunan aktivis muslim progresif yang dilakukan oleh Social Movement Institute selaras dengan tiga agenda yang dimiliki oleh Islam progresif yakni kesetaraan gender, pluralisme dan keadilan social. Dalam kesetaraan gender hasil pembangunan aktivis muslim progresif adalah dengan adanya beberapa alumni aktivis Social Movement Institute yang giat mempromosikan kesetaraan gender di wilayah dan lingkupnya masing-masing. Begitupun dalam agenda pluralisme hasil pembangunan aktivis muslim progresif yang dilakukan Social Movement Institute adalah adanya alumni aktivis SMI yang aktif mempromosikan pluralisme di tempat mereka masing-masing selain itu ada juga alumni aktivis SMI yang mengikuti forum dialog lintas iman di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan di dalam agenda keadilan social hasil pembangunan aktivis

muslim progresif yang dilakukan SMI dibuktikan dengan adanya beberapa alumni yang aktif melakukan advokasi kepada petani di tempatnya masing-masing.

B. Saran

Pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pembangunan belum menjadi sebuah penelitian yang cukup lengkap dan sempurna karena masih ada banyak celah dan ruang yang masih dapat di eksplorasi lebih dalam. Mengingat penelitian ini hanya mengambil studi kasus di satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pembangunan kepada para aktivisnya. Oleh karena itu ada baiknya kedepanya penelitian ini dapat dilanjutkan dan disempurnakan dengan mengeksplorasi celah yang masih ditinggalkan dari penelitian ini dengan mengambil studi kasus tidak hanya disatu Lembaga Swadaya Masyarakat melainkan dibeberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pembangunan intelektual organik. Dengan mengambil studi kasus di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pembangunan intelektual organik dapat menjadi bahan perbandingan sejauh mana kesamaan dan perbedaan di dalam peran dan hasil pembangunan aktivis yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fachry dan Effendi Bachtiar. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Arimin M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Basrowi dan Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bell Daniel. *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976.
- Budiman Arief. *Teori Pembangunan Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bruinessen van Martin. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Budairi Muhammad. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, Jakarta: E-Law, 2002.
- Dakhidae Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Djoyohadikusumo Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Edwards Michael. *NGOs Right and Responsibilities*, London: The Foreign Policy Center, 2000.
- Edwards Michael dan Hulme David. *Non-Governmental Organizations, Performance and Accountability: Beyond the Magic Bullet*, London: Earth Scan Publication Ltd, 1995.
- Fakih Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gaffar Affan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

- Hardjanto Imam. *Teori Pembangunan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Hasan Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Herdiansyah Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayatullah Syarif. *Islam Isme-Isme: Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hikam, A.S. Muhammad. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- H.T Wilson. *Sex and Gender, Making Cultural Sense Civilization*, Leiden, 1989.
- Jursy Salahuddin. *Membumikan Islam Progresif*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Kartasmita Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996.
- Latief Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
- Madjid Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- _____, *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001.
- Masoed Mohtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Misrawi Zuhairi. *Dari Islam Liberal Menuju Islam Progresif* kata pengantar untuk buk Jursy Salahuddin, *Membumikan Islam Progresif*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Murtadho Ali. *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi Tentang Pemikiran dan aksi Gerakan Sosial Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nafziger, E. Wayne. *Economic Development*, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Noor, A. Farish. *Islam Progresif: Peluang, Tantangan dan Masa Depan di Asia Tenggara*, Yogyakarta: SAMHA, 2006.

- Nugraheni Primanda Hardina. *Strategi Advokasi LSM Terhadap Eksistensi Hutan Jawa*, Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010.
- Praja Nata Ageng. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society*, Semarang: Pascasarjana UNDIP, 2017.
- Prasetyo Eko. *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana menuju Gerakan*, Yogyakarta: Resist Book, 2014.
- Prasetyo Hendro dkk. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Safi Omid. *Islamic Modernism* dalam Encyclopedia of religion, Farmington Hills: McMillan, 2005.
- _____. *Progressive Muslim: On Justice Gender and Pluralism*, England: One World Publication, 2005.
- _____. *The Politics of Knowledge in Premodern Islam*, Chappel Hill: UNC Press, 2006.
- Sen Amartya. *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1984.
- _____. *Masih Adakah Harapan Bagi Orang Miskin*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2001.
- _____. *Resources Values and Development*, Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Sen, Amartya dan Martha. *The Quality of life*, Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Shihab Quraish. *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suharko. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Tjokrowinoto Moeljarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Herdiansyah Gandjar Ari dan Randi, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menopang Pembangunan di Indonesia.” *Jurnal Sosioglobal*. 2016.

Humaidi Zuhri. “Peranan LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Atas Perubahan Paradigmatis Gerakan LSM di Indonesia.” *Jurnal Informasi*, Vol. 14, No. 03, 2009.

Indarti Henny Sri. “Pembangunan Manusia dalam Pandangan Amartya Sen.” *The Indonesian Journal of Public Administration*, No. 3, 2013.

Indro Nur P. Y. “Kemiskinan Global Perspektif Development as Freedom Amartya Sen Kasus: Indonesia.” *Jurnal HI UKP*, 2013.

Suaedi Ahmad. “Gerakan Muslim Progresif Pasca Rejim Soeharto di Indonesia.” *TOLERANSI: Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, No. 2 Juli 2018.

Walkers Melanie. “Amartya sen’s Capability Approach and Education.” *Journal Educational Action Research*, Vol 13, No 1, 2005.

Website

<https://wowbabel.com/2020/08/20/hubungan-dan-relasi-gender-yang-seimbang-dan-setara-dapat-meminimalisir-kdrt?fbclid=IwAR1xzXsZX80nfyvHRGNEc0S7jz0SIDdQaIUJyOKUvjtEfjBaxZQF10G3Nwg>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Sekolah Aktivis Pemula



Gambar 2: Diskusi Mingguan SMI



Gambar 3: Bedah Buku Bulanan SMI



Gambar 4: Nobar Film SMI



Gambar 5: Buku Terbitan SMI



Gambar 6: Laman Depan Web Suluh Pergerakan



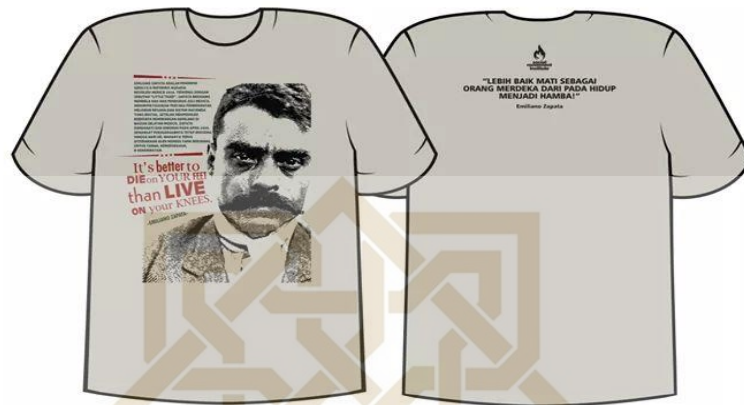
Gambar 7: Jurnal Suluh Pergerakan



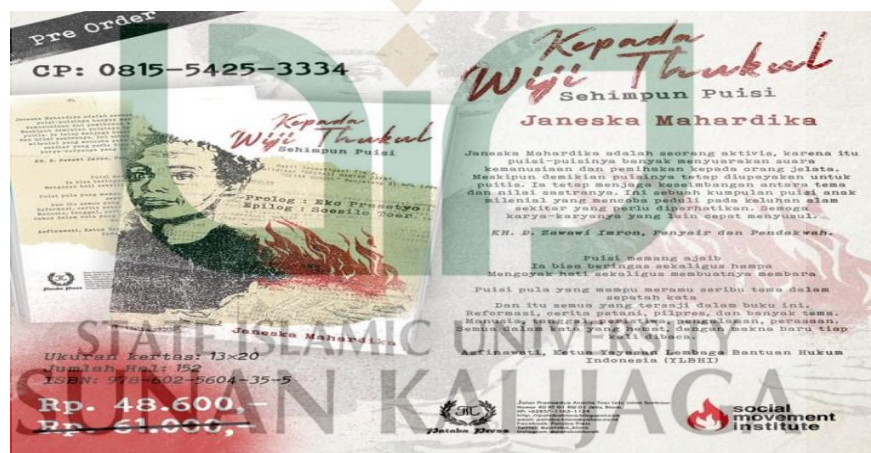
Gambar 8: Advokasi di Urut Sewu Kebumen



Gambar 9: Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik



Gambar 10: Penjualan Kaos Gerakan



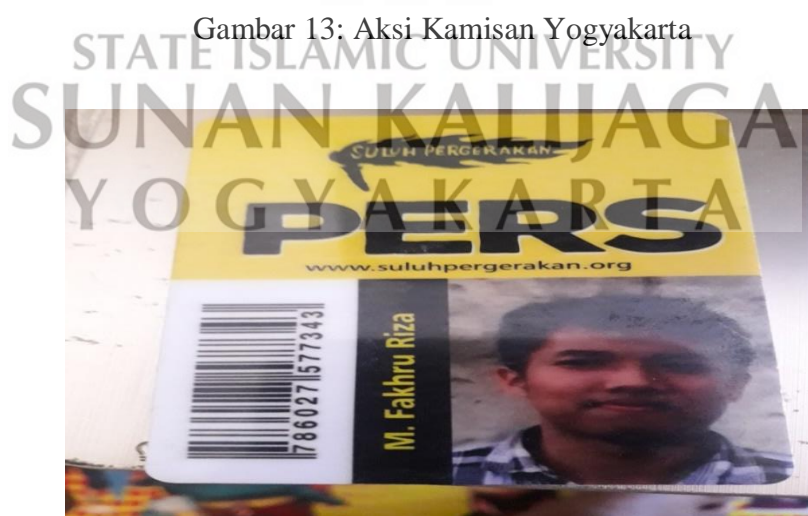
Gambar 11: Penjualan Buku



Gambar 12: Pembentukan Serikat Petani di Desa Gandurejo



Gambar 13: Aksi Kamisan Yogyakarta



Gambar 14: Kartu Pers Suluh Pergerakan



Gambar 15: Pamflet Sekolah Menulis Progresif



Gambar 16: Pementasan Teater Suluh



Gambar 17: Malam Sastra Suluh



Gambar 18: Aktivis SMI bersama Aliansi Solidaritas Pangan Jogja



Gambar 19: Diskusi Kesenjangan Perempuan SMI



Gambar 20: Tulisan Tentang kesetaraan Gender Alumni Aktivis Perempuan SMI



Gambar 21: Bedah buku kerjasama dengan PMKRI



Gambar 22: Dialog lintas Agama antara aktivis SMI dengan Stube hemat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE (CV)

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jayyidan Falakhi Mawaza
2. Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 29 Desember 1995
3. Alamat : JL. Panglima Sudirman 178 Pacitan
4. Nomor Telpn : 08952299994
5. Agama : Islam
6. Email : jayyidanfm@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Huda Ploso Pacitan
2. MTS Al-Anwar Ploso Pacitan
3. MA Al-Anwar Ploso Pacitan
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

III. Riwayat Organisasi

1. Ketua Organisasi Pondok Pesantren Modern (OPPM) Pondok Pesantren Modern Al-Anwar Periode 2013-2014
2. Devisi Advokasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Pondok Syahadat Yogyakarta Periode 2016-2017
3. Devisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2019-2020

4. Ketua Ikatan Alumni Pondok Al-Anwar Pacitan (AIPA) periode (2020-2025)
5. Koordinator Ikatan Pemuda Desa Indonesia (IPDA) Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025

